



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 827-834

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peranan BUMDes Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara

Berkat Putra Lase^{1✉}, Adrianus Bawamenewi², Anugerah Tatema Harefa³, Berkat Persada Lase⁴

Universitas Nias

Email: laseberkatputra@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan, kendala, serta upaya BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa : Pertama, Peranan BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial warga masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena jenis usaha BUMDes masih terkendala sehingga masyarakat merasa tidak puas untuk menggunakan fasilitas BUMDes. Kedua Kendala BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial warga yaitu karena kekurangan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat, dan terdapat barang yang tidak layak pakai, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, serta karena BUMDes kekurangan modal usaha. Ketiga, Upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial warga yaitu Pemerintah Desa bersama Direktur BUMDes melakukan musyawarah, peninjauan ulang terhadap jumlah barang BUMDes.

Kata Kunci: *Peranan BUMDes, Kebutuhan Sosial*

Abstract

This research aims to determine the role, obstacles and efforts of BUMDes in improving the fulfillment of the social needs of residents of Marafala Village, North Nias Regency. This research uses a descriptive approach with qualitative methods, with data collection techniques namely observation, interviews, documentation. The results of the research concluded that: First, the role of BUMDes in increasing the fulfillment of residents' social needs is still not fully implemented well because the type of BUMDes business is still constrained so that people feel dissatisfied with using BUMDes facilities. The two obstacles to BUMDes in increasing the fulfillment of residents' social needs are due to a shortage of goods needed by the community, and there are goods that are not suitable for use, the lack of public trust in BUMDes, and because BUMDes lacks business capital. Third, efforts to overcome BUMDes' obstacles in increasing the fulfillment of residents' social needs, namely the Village Government together with the BUMDes Director holding deliberations and reviewing the number of BUMDes goods.

Keywords: *The Role of BUMDes, Social Needs*

PENDAHULUAN

Sesuai pasal 1 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menangani urusan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa dan adat-istiadat lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Melalui undang-undang tersebut, Desa dapat membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, eskalasi peran, dan pemberdayaan.

Pemerintahan desa memiliki wewenang strategis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, yang berarti mereka memiliki aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam Undang-Undang perdesaan yang harus diikuti oleh penduduk yang tinggal di desa tersebut. Oleh karena itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. (Yaya & Aliyudin, 2018:92).

Menurut Sa'dullah (dalam Agung gunanto 2016:68), karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan, yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pembentukan stabilitas nasional, desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan berfokus pada desa sebagai sarana pembangunan, yang memungkinkan pencapaian tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) menjelaskan bahwa desa dapat membentuk badan usaha milik desa berdasarkan kebutuhan dan potensinya. BUMDes didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (PKDSP, 2007). BUMDes telah membantu

meningkatkan ekonomi pedesaan dan mengembangkan masyarakat, terutama dalam menghadapi Komunitas Ekonomi Asean 2015. Asean Economic Community 2015 (Alkadafi, 2014:32).

Secara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa untuk meningkatkan perekonomian desa dan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes didirikan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013:1076). Ini karena keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah mengelola potensi yang inovatif dan kreatif di desa. Ini dapat menghasilkan lapangan kerja baru dan membantu pemerintah menyerap tenaga kerja baru di pedesaan. melalui penyediaan sumber daya lokal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan lembaga sosial dengan menyediakan pelayanan sosial yang menguntungkan masyarakat.

BUMDes, sebagai salah satu bentuk usaha desa yang dominan, diharapkan tidak membebani masyarakat dalam upaya untuk menggerakkan perekonomian desa. Tujuan BUMDes adalah memberikan pelayanan distribusi yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan desa, baik konsumtif maupun produktif. BUMDes juga diwajibkan untuk mampu memberlakukan harga dan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan standar pasar ketika berusaha memberikan layanan kepada orang di luar desa. BUMDes dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan perekonomian, mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dengan pihak ketiga, menciptakan jaringan pasar dan peluang untuk memenuhi kebutuhan layanan umum warga, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes.

Secara teoritis, kebutuhan akan cinta, persahabatan, peranan yang dimiliki dan diterima kelompok, dan kekeluargaan sosial adalah contoh kebutuhan sosial. Di sisi lain, secara praktis, kebutuhan sosial termasuk kelompok formal, kegiatan yang disponsori organisasi, dan peringatan (Handoko, 2014: 258).

Berdasarkan hasil Observasi awal, salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Ododogo Desa Marafala Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara, yang dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya terutama di bidang sewa dan rental. Usaha yang dimiliki oleh BUMDes Marafala dalam hal sarana dan prasarana berupa penyediaan barang dan jasa di antaranya

terpal, kursi, mobil desa, krans bunga, alat dapur desa, *sound system* desa. Kehadiran BUMDes ini diharapkan sebagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan sosial warga desa.

Dalam kapasitas mereka untuk menjalankan pemerintahan di wilayah desa, aparat pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan melaksanakan peran mereka secara efektif untuk membantu masyarakat desa. Akan tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pemenuhannya. Disisi lain pemerintah masih belum bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran dan sumber daya yang di perlukan untuk menjalankan BUMDes seperti pengadaan kursi desa yang tergolong sedikit, jumlah terpal yang minim, perbaikan mobil desa yang masih terhambat akibat dana yang tidak terpenuhi, serta masih belum sepenuhnya menjalankan BUMDes sesuai potensi dan kebutuhan desa.

Selain itu kebutuhan sosial masyarakat yang masih belum terpenuhi seperti pemerintah masih belum transparan terhadap pengelolaan hasil BUMDes sehingga timbul pertanyaan terhadap hasil pengelolaan BUMDes. Ketidaksesuaian program BUMDes dengan kebutuhan sosial desa, sehingga memicu kurangnya ketepatan terhadap pencapaian tujuan pembuatan BUMDes.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui peranan, kendala, serta upaya BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Fitrah (2017:36), pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada atau saat masa yang lampau. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mencari makna yang berawal dari fakta dengan melakukan observasi dengan mencatat semua fakta secara holistik bersifat ilmiah (naturalistik) dengan masalah yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mendefinisikan persepsi manusia (tindakan, keberadaan, dan pengalaman). Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri sehingga peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Peneliti langsung ke lokasi penelitian mengumpulkan informasi untuk penelitian. Adapun prosedur mengumpulkan data berupa observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Sehingga alat pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan *handphone* untuk merekam suara serta mendokumentasikan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama peneliti berada dilokasi penelitian yakni Desa Marafala Kabupaten Nias Utara, adapun hasil penelitian yang diperoleh peneliti sebagai berikut :

Peranan BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara

BUMDes Marafala telah berperan dalam meningkatkan kebutuhan warga desa Marafala dimana jenis usaha yang telah di buat sangat berpengaruh pada kebutuhan sosial warga desa Marafala dengan dibentuknya jenis usaha seperti sewa tenda, kursi, sewa mobil desa, rental keyboard, jasa angkutan air bersih. Dengan adanya BUMDes maka masyarakat desa marafala dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial warga desa dapat terpenuhi dimana jenis jenis usaha BUMDes dapat digunakan masyarakat dalam menjalankan aktifitas nya sehari hari

Kendala BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara

Kendala BUMDes dalam meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara yaitu kurangnya Jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat, banyaknya keluhan masyarakat terhadap jenis usaha yang disediakan seperti barang kursi dan tenda yang tidak layak pakai, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes karena masyarakat menganggap bahwa BUMDes berupa formalitas saja yang digunakan untuk kepentingan personal. Selanjutnya, BUMDes Ododogo di Desa Marafala mengalami keterbatasan modal dalam hal pembiayaan penambahan jumlah barang BUMDes sehingga hal ini cukup menyulitkan dalam melakukan ekspansi usaha. Seyogyanya BUMDes Marafala memerlukan modal yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sosial warga desa Marafala dikarnakan jenis usaha yang di bentuk BUMDes Marafala terbilang sedikit di tandai dengan jumlah kursi dan tenda yang tergolong sedikit serta biaya pemeliharaan mobil BUMDes yang sangat minim.

Upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara

Upaya mengatasi kendala BUMDes dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial Warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara yaitu dengan cara pemerintah desa bersama Direktur BUMDes melakukan musyawarah, dan melakukan peninjauan ulang

terhadap jumlah barang. BUMDes harus memiliki bukti untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jika ini terjadi, orang yang sudah percaya akan BUMDes dapat membantu menjelaskan kepada orang lain. Selain itu, kepengurusan BUMDes di Desa Marafala harus diperbarui. Selanjutnya modal yaitu dengan cara meminta bantuan kepada pemerintah desa untuk di anggarkan di APBDes sebagai titik fokus pendanaan, dan melakukan pinjaman Bank jika di setujui oleh pemerintah desa.

SIMPULAN

BUMDes dalam memenuhi kebutuhan sosial warga Desa Marafala Kabupaten Nias Utara sudah sangat berperan meskipun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan sosial warga yaitu kekurangan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dan kekurangan modal dalam menjalankan jenis usaha. Upaya mengatasi kendala tersebut yaitu pemerintah desa bersama Direktur BUMDes melakukan musyawarah dalam peninjauan ulang terhadap jumlah barang, BUMDes harus memberikan bukti yang nyata serta pemenuhan modal yaitu pemerintah desa menganggarkan modal BUMDes di APBDes serta melakukan pinjaman Bank jika di setujui oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Gunanto, E.Y, A. D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*.
- Alkadafi. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan usaha Milik Desa Menuju ASEAN Economic Community. *Jurnal El-Riyasah*.
- Budiono, P. 2015. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor. *Jurnal Politik Muda*.
- Handoko, T. H. (2014). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan). (2007). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Ramadana, Coristya Berlin, dkk. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, 1068-1076.

Sutopo, Adiputra dan Febrian 2016. Analisis Pengaruh Kepuasan dan Persepsi Harga terhadap Citra Restoran dan Minat Beli Ulang Pelanggan Holycow Semarang. *Journal of Management*.

Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yaya dan Aliyudin.2018. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani''dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*,Vol 3, No 1.